

Penerapan Permendagri Pada SIPD Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendal

Alyaa Nurardia Rahma^{1*}, Heppy Purbasari²
 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia^{1,2}
 Email : alyaanurardia@gmail.com, hp123@ums.ac.id

KATA KUNCI	ABSTRAK
SIPD, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Audit Keuangan.	<i>Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan menjadi tuntutan utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) hadir sebagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari adaptasi teknologi hingga pemahaman terhadap regulasi baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dalam SIPD untuk penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Kota Kendal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pejabat keuangan dan auditor, serta analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai dinamika penerapan SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Permendagri melalui SIPD berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Fitur-fitur seperti audit trail dan kemudahan akses data diakui sebagai elemen kunci keberhasilan sistem. Namun, tantangan muncul dalam hal kesiapan auditor dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Faktor paling berpengaruh dalam keberhasilan implementasi adalah kecakapan SDM, ketersediaan fitur audit, dan pemahaman terhadap standar audit berbasis digital. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi sistem SIPD agar sistem pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan akuntabel.</i> ABSTRACT <i>The preparation of accountable and transparent financial reports is a key demand in regional government financial management. The Regional Government Information System (SIPD) emerged as an innovation to improve the efficiency and effectiveness of financial reporting. However, its</i>

KEYWORD

SIPD, Financial Statements, Local Government, Financial Audit.

implementation faces various challenges, ranging from technological adaptation to understanding new regulations. This study aims to analyze the implementation of the Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) within the SIPD framework for financial report preparation in the Kendal City Government and to identify factors influencing its success. This research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews with financial officials and auditors, as well as analysis of relevant policy documents. This approach was chosen to gain a comprehensive understanding of the dynamics in SIPD implementation. The findings show that implementing Permendagri through SIPD has contributed to improvements in the efficiency and transparency of financial reporting. Features such as audit trails and ease of data access are acknowledged as key success elements. However, challenges remain, particularly concerning auditors' readiness and the optimal utilization of information technology. The most influential factors in successful implementation include human resource competency, availability of audit features, and understanding of digital-based audit standards. The practical implications of this study highlight the need to enhance human resource capacity through continuous training and systematic dissemination of SIPD functionalities. Strengthening these aspects is essential to ensure that financial reporting systems operate more effectively, adaptively, and accountably in line with digital transformation in the public sector.

Alyaa Nurardia Rahma^{1*}, Heppy Purbasari²
alyaanurardia@gmail.com, hp123@ums.ac.id
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi



PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, memberikan pedoman teknis yang jelas terkait penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas. Untuk menunjang pelaksanaannya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hadir sebagai platform terpadu yang memungkinkan pengelolaan data keuangan secara lebih efisien dan terintegrasi. SIPD tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SIPD mampu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (Dione, 2020; Permadi, 2023). Namun, tantangan signifikan tetap ada, termasuk kurangnya pelatihan bagi aparatur daerah dan keterbatasan infrastruktur teknologi (Balqis & Fadhly, 2021; Ekaputra, 2021). Hal ini menimbulkan disparitas efektivitas implementasi SIPD antar daerah, termasuk di wilayah dengan tingkat kesiapan rendah. Kondisi ini menegaskan perlunya studi lokal yang mendalam seperti di Kabupaten Kendal, dan sekaligus mengisi kekosongan penelitian dari daerah lain yang menghadapi tantangan serupa namun belum banyak diungkap secara akademis.

Penerapan PERMENDAGRI pada SIPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendal

Penerapan SIPD yang sesuai dengan Permendagri berpotensi memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan dukungan teknologi (Aprsiansyah et al., 2020), serta mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusia (Wardhani et al., 2022). Dengan akses informasi keuangan yang lebih terbuka, SIPD juga menjadi medium strategis untuk meningkatkan partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah (Firmansyah et al., 2022; Rizki, 2023).

Namun demikian, di Kabupaten Kendal, belum ada studi komprehensif yang secara spesifik mengkaji sejauh mana implementasi Permendagri dalam SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Identifikasi masalah ini didasarkan pada observasi awal terhadap laporan BPK, wawancara dengan pejabat keuangan daerah, dan perbandingan indikator akuntabilitas sebelum dan sesudah SIPD diterapkan. Beberapa studi sebelumnya memang membahas kualitas pelaporan keuangan (Warliana, 2023; Munggaran et al., 2020; Lantu, 2023), namun belum secara eksplisit menyoroti sinergi antara regulasi, SDM, dan teknologi informasi dalam konteks SIPD Kabupaten Kendal.

Literatur terkini juga kurang menggambarkan bagaimana SIPD berfungsi sebagai alat koordinasi antarlembaga pemerintahan di tingkat lokal, atau bagaimana faktor-faktor seperti aksesibilitas informasi keuangan berdampak terhadap persepsi publik terhadap kinerja keuangan daerah (Sipi & Tandi, 2021; Leunupun, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menyajikan analisis integratif antara regulasi, teknologi informasi, dan kapasitas SDM di satu wilayah studi spesifik, sehingga mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap literatur pengelolaan keuangan daerah yang masih bersifat umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Permendagri terhadap efektivitas SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kendal. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala dalam implementasi SIPD, menilai peran kompetensi SDM, serta membandingkan kualitas pelaporan keuangan sebelum dan sesudah SIPD diterapkan. Penelitian ini penting tidak hanya untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah secara internal, tetapi juga untuk mendukung agenda reformasi birokrasi, memperkuat kepercayaan publik, dan memberikan acuan perumusan kebijakan fiskal daerah ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Subjek berjumlah 5 – 10 orang informan meliputi pegawai dengan rentang usia 25 sampai dengan 55 tahun yang meliputi berbagai jabatan kunci dalam struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKEUDA). Pekerjaan informan yang diwawancarai di BAKEUDA meliputi: Kepala BAKEUDA, Perencana Keuangan, Pelaksana SIPD, Auditor Internal, Staf Keuangan. Dengan kriteria pendidikan informan minimal Sarjana (S1) Akuntansi, Manajemen, atau bidang terkait, dengan pengalaman kerja tiga tahun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan kuesioner dan rekaman suara dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BAKEUDA) dibentuk untuk mendukung sektor keuangan pemerintahan di sektor keuangan, dengan tanggung jawab utama meliputi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, penatausahaan aset, dan pelaporan keuangan. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Kabupaten Kendal menjadi salah satu kabupaten pertama di Jawa Tengah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yaitu aplikasi yang dirancang untuk mengefisienkan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan data pembangunan dan keuangan daerah. Penerapan SIPD merupakan langkah signifikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Dengan mendorong kemandirian finansial, transparansi, dan penggunaan teknologi informasi yang efektif, BAKEUDA berperan penting dalam memajukan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa penerapan Permendagri melalui sistem SIPD telah meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kendal. SIPD tidak hanya dipandang sebagai perangkat pendukung, tetapi juga sebagai katalisator peningkatan kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah dengan memenuhi kriteria relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas. Meskipun memiliki berbagai manfaat, namun masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam memastikan ketersediaan data, kepatuhan terhadap standar akuntansi, relevansi informasi, transparansi, dan kompetensi staf. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk integrasi data, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan pengendalian internal. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola keuangan daerah.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) melalui sistem SIPD di Kabupaten Kendal menghadapi beberapa tantangan. Informan umumnya memandang kebijakan tersebut secara positif tetapi mengakui perlunya mengatasi berbagai masalah untuk meningkatkan efektivitasnya. Kendala utama meliputi kurangnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, pemahaman yang terbatas tentang peraturan terkait SIPD di kalangan staf, dan pedoman teknis yang tidak jelas dari pemerintah pusat. Selain itu, keterlambatan dalam menerbitkan peraturan daerah (Perbup) telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam proses penganggaran, pencatatan, dan audit. Mengatasi masalah ini memerlukan percepatan perumusan Perbup, peningkatan kejelasan peraturan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan dukungan teknis.

Mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pemanfaatan SIPD dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Kendal, narasumber menyoroti tingkat kompetensi saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan SIPD, menekankan perlunya pelatihan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Meskipun ada beberapa kemajuan, masih ada kesenjangan, terutama dalam akuntansi, teknologi informasi, dan audit keuangan. Peningkatan kompetensi SDM harus diutamakan melalui pelatihan yang terfokus pada perencanaan dan audit keuangan. Program pelatihan yang ada telah menunjukkan dampak positif, tetapi evaluasi dan peningkatan yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

Membandingkan kualitas laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan. Penerapan SIPD di Kabupaten Kendal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri telah meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan, khususnya dari segi relevansi, keandalan, dan daya banding. Narasumber mencatat adanya peningkatan akurasi, ketepatan waktu, dan integrasi dengan perencanaan keuangan, serta peningkatan efisiensi dan transparansi yang memudahkan pekerjaan pegawai. Meskipun demikian, evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang, khususnya melalui digitalisasi, penguatan pengendalian internal, peningkatan standar akuntansi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Kendal dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kompetensi sumber daya manusia, integrasi data, kegunaan sistem, pelatihan yang memadai, fitur audit trail, dan aksesibilitas data. Narasumber menekankan bahwa kerangka regulasi dan

pedoman teknis, khususnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), memegang peranan penting dalam mendukung penerapan SIPD. Pelatihan yang berkelanjutan, kemampuan analisis data yang kuat, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada secara efektif.

Keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kota Kendal dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor utama yang memengaruhi adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM), dukungan kepemimpinan, dan infrastruktur teknologi yang memadai. SDM dengan keterampilan akuntansi dan TI yang kuat meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD (Sanny, 2023), sementara kepemimpinan yang visioner menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi inovasi (Ekaputra, 2021). Infrastruktur yang kuat juga penting untuk memastikan kinerja sistem yang optimal (Banea, 2024). Selain itu, kerangka regulasi—terutama Peraturan Pemerintah No. 12/2019 dan Permendagri No. 77/2020—memberikan pedoman hukum dan teknis yang mendorong sistem manajemen keuangan terpadu (Ekaputra, 2021). Kebijakan daerah yang mendukung pelatihan dan pengadaan infrastruktur semakin memperkuat implementasi SIPD (Dione, 2020). Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait keterbatasan kapasitas SDM dan seringnya perubahan kebijakan. Pelatihan yang tidak memadai dan kurangnya sosialisasi menghambat pemahaman dan penggunaan sistem yang tepat (Vitriana et al., 2022; Nurbudiwati, 2022). Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas dan komunikasi kebijakan yang konsisten sangat penting untuk memastikan penerapan SIPD yang efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Permendagri No. 77 Tahun 2020 melalui SIPD di Kabupaten Kendal telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya dalam hal akurasi, ketepatan waktu, dan keterbandingan antar periode. Sistem yang terintegrasi mendorong efisiensi pengelolaan data serta memperkuat transparansi dan kontrol internal. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan teknologi informasi, kejelasan regulasi, serta dukungan berkelanjutan dari pimpinan daerah. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan pemahaman staf, perubahan kebijakan yang dinamis, dan kebutuhan pelatihan berkelanjutan masih menjadi hambatan. Untuk itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas melalui pelatihan sistematis, peningkatan infrastruktur digital, integrasi lintas sektor, serta pemanfaatan fitur audit berbasis risiko guna mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih adaptif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, MI, Sudirman, S., Masdar, R., Din, M., & Firman, MF (2022). Antecedent Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Internasional Tinjauan Bisnis Profesional*, 7(5), e0709. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e709>
- Anderson, EP, Jackson, S., Tharme, RE, Douglas, MM, Flotemersch, JE, Zwarteveen, M., Lokgariwar, C., Montoya, M., Wali, A., Tipa, G., Jardine, TD, Olden, JD, Cheng, L., Conallin, J., Cosens, B., Dickens, C., Garrick, D., Groenfeldt, D., Kabogo, JE, ...

- Arthington, A. (2019). Memahami Sungai dan Hubungan Sosialnya: Langkah Penting untuk Memajukan Pengelolaan Air Berwawasan Lingkungan. *Wiley Interdisciplinary Reviews Water*, 6(6). <https://doi.org/10.1002/wat2.1381>
- Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Toples*, 1(1), 44–62. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10944>
- Aziiz, MN, & Prastiti, SD (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Distanaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 117. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4246>
- Banea, AE (2024). Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung; Implementasi, Kendala Dan Solusi. *Jiap*, 10(1), 73–83. <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48342>
- Chintya, KD (2023). Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Dari Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 586–601. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7274>
- Chotimah, SN (2023). Penggunaan Metode Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Jurmik*, 3(2), 36–43. <https://doi.org/10.53416/jurmik.v3i2.231>
- Dewi, S. (2023). Perancangan Sistem Informasi Desa Bintang Sidikalang (Sidesta) Berbasis Web. *J-Intech*, 11(2), 336–346. <https://doi.org/10.32664/j-intech.v11i2.1021>
- Diegtiar, O., Кравченко, Т. А., Yevmieshkina, OL, Sych, T., & Linetska, YM (2021). Landasan Inovatif untuk Mengoptimalkan Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. *Linguistics and Culture Review*, 5(S4), 955–967. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1774>
- Difinubun, Y. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. *Jurnalfairakuntansiunimuda*, 2(1), 34–45. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v2i1.2884>
- Dione, Fran. (2020). Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Ekaputra, N. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 1–13
- Febria, A. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 37–44. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.3648>
- Firmansyah, A., Yuniar, MR, & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (Akurasi)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>

Penerapan PERMENDAGRI pada SIPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendal

- Fitria, N., & Wibisono, N. (2020). Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Jaaf (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Terapan)*, 3(2), 85. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v3i2.808>
- Fitriasari, D. (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 34–54. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.649>
- Hasana, NA (2023). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(7). <https://doi.org/10.59188/nilaiko.v14i7.3983>
- Herlina, V. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kerinci). *Ebisma (Jurnal Manajemen Bisnis & Akuntansi Ekonomi)*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.11>
- Hidayatullah, S., Khourouh, U., Windhyastiti, I., Patalo, RG, & Waris, A. (2020). Model Implementasi Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean Terhadap Sistem Pembelajaran Berbasis Aplikasi Zoom Di Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 6(1). <https://doi.org/10.26905/jtmi.v6i1.4165>
- Ilhadi, V., & Arif, R. (2021). Perancangan Dan Penerapan Sistem Informasi Dalam Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas. *Sisfo Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 5(2). <https://doi.org/10.29103/sisfo.v5i2.6223>
- Irwan, I., Gistituati, N., & Rusdinal, R. (2021). Perilaku Dan Pengembangan Organisasi Pendidikan (Pendekatan Lintas Budaya dan Global terhadap Manajemen Perubahan). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(3), 582–587. <https://doi.org/10.30605/jsdp.4.3.2021.1276>
- Jati, BP (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i1.145>
- Kartikaningtyas, AP (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.59330/jai.v2i1.16>
- Klore, SEL (2023). Sistem Informasi Pelayanan Surat Menyurat Dan Disposisi Pada Kantor Kampung Yuwanain. *Buletin Insinyur Jaringan dan Informatika*, 1(2), 78. <https://doi.org/10.59688/bufnets.v1i2.17>
- Lantu, FT (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 91–97. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4255>
- Leunupun, P. (2022). Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Pemilik*, 6(3), 1364–1376. <https://doi.org/10.33395/pemilik.v6i3.884>
- Mandasari, Z. (2022). Implementasi Pendekatan Citizen's Charter Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pada Penyajian Disabilitas Di Kota Banjarbaru. *Makalah Kerja Bappenas*, 5(3), 394–406. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i3.188>

- Manik, T. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Dan Pencegahan Fraud Di Provinsi Kepri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i1.1513>
- Marpaung, G. (2022). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi DATA COVID-19 Kota Bontang Dengan Pendekatan Model Delone Dan McLean. *Konstelasi Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2). <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v2i2.6245>
- Munggaran, AK, Suratno, S., & Yusuf, M. (2020). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 335–346. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i5.69>
- Murtin, A., & Rahmawati, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(1), 17–28. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i1.3>
- Nurbudiwati, N. (2022). Analisis Implementasi Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Penerapan Pencetakan Kartu Keluarga Secara Mandiri (Studi Kasus Di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut). *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 66–84. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i2.129>
- Nuridin, N., Scheepers, H., & Stockdale, R. (2022). Sistem Sosial untuk E-Pemerintahan Lokal yang Berkelanjutan. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 24(1), 1–31. <https://doi.org/10.1108/jsit-10-2019-0214>
- Olson, J., Hadjiconstantinou, M., Luff, C., Watts, KC, Watson, N., Wagstaff, A., Miller, V., Schofield, D., Khunti, K., Davies, MJ, & Calginari, S. (2022). Dari Inggris ke Australia—Mengadaptasi Program Pendidikan Pengelolaan Diri Berbasis Web untuk Mendukung Pengelolaan Diabetes Tipe 2: Tutorial. *Jurnal Penelitian Internet Medis*, 24(4), e26339. <https://doi.org/10.2196/26339>
- Oramah, CP, & Olsen, OE (2021). Keadilan dan Kesetaraan dalam Adaptasi Perubahan Iklim: Implikasi Kebijakan dan Praktis di Nigeria. 1767–1787. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45106-6_45
- P, SAM, & Suhartono, E. (2021). Faktor Penentu Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 17(2), 73–86. <https://doi.org/10.53845/infokam.v17i2.295>
- Permadi, R. (2023). Implementasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor BPBD Muratara. *Jakpt*, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i1.83>
- Prayogi, GD, & Sudaryati, E. (2023). Pengaruh Tekanan Waktu, Tekanan Ketaatan, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Personil Aparat Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pendeteksian Fraud. *Jurnal Akuntansi Perilaku*, 2(1), 54–70. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.41>
- Putra, SA, & Varina, RJ (2021). Standar Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Reswari, YA, & Nazir, N. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Public Governance Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas

- Laporan Keuangan Pada Kementerian Ketenagakerjaan. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(9), 1051–1059. <https://doi.org/10.59188/jurnalalsosains.v2i9.487>
- Rizki, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada PDAM Tirta Musi Kota Palembang. *Jemsi (Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi)*, 9(5), 2157–2163. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1570>
- Saepuloh, J. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Garut). *Jurnal Publik*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.52434/jp.v15i1.38>
- Sanny, A. (2023). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Terhadap Penyusunan Anggaran Di Kota Parepare. *Ak99*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.31850/ak99.v3i1.2277>
- Sibiya, NP, Das, DK, Vogel, C., Mazinyo, SP, Zhou, L., Kalumba, AM, Sithole, M., Adom, RK, & Simatele, MD (2023). Mengatasi Hambatan Birokrasi: Analisis Hambatan Adaptasi Perubahan Iklim di Afrika Selatan. *Climate*, 11(7), 145. <https://doi.org/10.3390/cli11070145>
- Sipi, ADS, & Tandi, A. (2021). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11). <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.246>
- Suaryana, IGNA, Noviani, N., & Damayanthi, IGAE (2021). Model Adopsi Simbolis Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 84. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i01.p06>
- Subhi, GN, & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM Dan Teknologi Informasi Pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Ekuitas*, 24(2), 141–156. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2468>
- Sudewo, PA, Meilifa, & Christiana, W. (2022). Hubungan Antara Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Dengan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah: Studi Kasus Unit Kerja Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan. *Jurnal Widyaaiswara Indonesia*, 3(3), 119–130. <https://doi.org/10.56259/jwi.v3i3.107>
- Sundari, M. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jsma (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 15(2), 145–156. <https://doi.org/10.37151/jsma.v15i2.129>
- Syabrinildi, S. (2023). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *JCS*, 2(1), 250–255. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i1.205>
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Jurnal Bisnis Digital*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Wardhani, RS, Suhdi, Yunita, A., & Agustina, D. (2022). PELATIHAN DAN ASISTENSI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) Di DESA KARYA MAKMUR SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA. *Jurnal Abdi Insani*, 9(4), 1808–1814. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i4.736>

- Warliana, R. (2023). Pengaruh Psap Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Kota Medan. *Jurnal Proaksi*, 10(3), 366–381. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4060>
- Williams, DS, Celliers, L., Unverzagt, K., Videira, N., Costa, MM, & Giordano, R. (2020). Metode untuk Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Lokal dalam Adaptasi Perubahan Iklim. *Earth S Future*, 8(7). <https://doi.org/10.1029/2020ef001506>